

Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina

Muhammad Nizar Hidayat

Peneliti pada Nusantara Strategic House, Samarinda

Abstract:

This study aim to describe and analyze Uyghur diaspora struggle in promoting Uyghur's rights in Xinjiang China. It shows that Uyghur diaspora tried to achieve their goals in many ways, sometimes even contradicted each other. In 2004 Uyghur diaspora in Germany tried to unite this movements by establishing a well structured and well organized organization called World Uyghur Congress (WUC). It then actively promote Uyghur's rights using advocacy and propaganda.

Keywords: *Uyghur Diaspora, Civil Rights, WUC*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis upaya diaspora Uygur dalam memperjuangkan hak rakyat Uygur di Cina. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa diaspora Uyghur berupaya untuk mencapai tujuannya dengan berbagai cara, yang terkadang saling melemahkan. Pada tahun 2004 diaspora Uyghur di Jerman mencoba untuk menyatukan gerakan ini dengan membentuk World Uyghur Congress (WUC). Organisasi tersebut kemudian secara aktif memperjuangkan hak rakyat Uyghur melalui advokasi dan propaganda.

Kata Kunci : *Diaspora Uyghur, Hak Sipil, WUC*

Etnis Uyghur merupakan salah satu etnis asli dan mayoritas di Xinjiang yang oleh para penstudi antropologi digolongkan kedalam etnis Turki atau Turkic yang memang banyak dijumpai di Asia Tengah dan Asia Kecil. Etnis Uyghur sangat berbeda dengan mayoritas rakyat Cina (Han) dari segala aspek, baik dari segi fisik, budaya serta keagamaannya.

Etnis Uyghur, yang terkonsentrasi di Xinjiang Uighur Autonomous Region, merupakan komunitas Islam yang begitu kentara di China (Mazhab Hanafi dari Aliran Sunni). Mereka menggunakan bahasa Turki dan menganggap bahwa bahasa Cina adalah bahasa asing. Mereka berbagi tradisi budaya yang sangat kental dengan masyarakat muslim dari bekas Republik Soviet di Asia Tengah, dan hanya memiliki sedikit kesamaan dengan Etnis Han (Mackerras : 1994).

Sedangkan Xinjiang, atau lengkapnya Xinjiang Uyghur Autonomous Region, merupakan salah satu dari 5 Zizhiqu (Daerah Otonom) yang ada di Cina dengan ibukota Urumqi. Etnis yang terdapat di Xinjiang sangat beragam, mulai dari Uyghur, Han, Hui Kazakh, Kirgiz, Mongol, Uzbek, Tatar, dan Rusia. Sedangkan etnis mayoritas di Xinjiang adalah etnis Uyghur (45%) dan Han (41%). Jumlah penduduk di Xinjiang berkisar antara 18 juta orang berdasarkan sensus penduduk sepuluh tahunan yang dilakukan oleh pemerintah Cina (<http://www.fom.sg/Ethnic%20Groups%20in%20Xinjiang.pdf>).

Sejarah kepentingan Cina di daerah ini sudah ada bahkan sejak zaman kuno. Sumber resmi Cina modern menyatakan bahwa Cina telah memaksakan kedaulatannya ke atas Xinjiang sejak periode yang sangat lama. Bagaimanapun, di dalam periode panjang selama 2000 tahun, kekuasaan Cina terhadap Xinjiang, dari penaklukan pertama terjadi pada masa Dinasti Han (101 SM) sampai penaklukan terakhir tahun 1876 pada masa Dinasti Qing, hanya sekitar 220 tahun Cina bisa menguasai daerah tersebut (Rahman : 2005).

Ketika kekuasaan dinasti terakhir kekaisaran Cina, Dinasti Qing berakhir pada tahun 1911 sampai jatuhnya Cina pada rezim komunis tahun 1949, etnis Uyghur dan beberapa kelompok muslim lokal lainnya di Xinjiang sempat dua kali membentuk negara merdeka yang dinamakan East Turkestan Republic atau Uighurstan. Yang pertama berdiri pada tahun 1931 sampai 1934, dan yang kedua, didirikan pada tahun 1944 . East Turkestan Republic II ini kemudian runtuh ketika dipaksa untuk bergabung dengan Republik Rakyat Cina yang didirikan pada tahun 1949. Untuk empat dekade berikutnya, penguasa Partai Komunis di Xinjiang menutup potensi separatisme etnis di daerah ini dengan kontrol yang ketat. Namun untuk kebanyakan etnis Uyghur, harapan untuk memiliki negara sendiri tak pernah pudar (Chung : 2011).

Kebijakan pemerintah Cina kemudian mengalami perubahan dengan menjadi semakin terbukanya Cina pada akhir tahun 70-an sampai awal 90-an, mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan yang menyuarakan pembebasan Xinjiang. Sejak tahun 1980-an, aktivis transnasionalis Uyghur mulai berkembang, mereka mendapatkan momentumnya pada tahun 1990-an. Hal ini merupakan hasil dari reformasi yang dilakukan oleh Beijing dan *Open Door Policy* yang diterapkan sejak tahun 1979 (Alonso dan Oiarzabal : 2010).

Pada tahun-tahun tersebut gerakan nasionalis Uyghur yang dimulai oleh diaspora Uyghur mulai muncul ke permukaan dan mendapat perhatian dunia internasional. Meski demikian, bukan berarti bahwa gerakan nasionalis Uyghur tersebut baru muncul pada saat itu. Seperti dijelaskan sebelumnya, rakyat Uyghur dulunya merupakan sebuah entitas yang merdeka sebelum akhirnya dianeksasi oleh Cina pada 1949. Pada tahun 1990-an gerakan nasionalis Uyghur mulai muncul dan dikenal oleh masyarakat internasional dan secara umum gerakan nasionalis Uyghur ini kemudian terbagi menjadi beberapa kategori

sesuai dengan agenda dan cara mereka dalam mencapai tujuannya. Ada yang mengedepankan advokasi dan negosiasi, ada pula yang mengedepankan kekerasan dan terorisme. Begitu pula dengan agendanya. Ada yang ingin mendirikan negara Islam, ada yang sekuler, ada yang berdasarkan kesukuan (Uyghur) dan ada yang menginginkan pluralisme etnis, ada yang tak menoleransi apapun kecuali kemerdekaan, ada pula yang hanya menginginkan otonomi yang lebih luas.

Hingga pada tahun 2004, muncul sebuah organisasi pembebasan Uyghur yang memiliki kredibilitas serta konsep dan yang paling penting, bekerja untuk merapikan dan mengorganisir kelompok-kelompok yang tersebar baik secara geografis maupun cara untuk mencapai tujuannya, yakni World Uyghur Congress (WUC). World Uyghur Congress adalah organisasi yang didirikan oleh para kelompok pelarian/diaspora Uyghur yang tersebar di beberapa daerah di dunia. Ada alasan tersendiri mengapa WUC didirikan di Jerman, bukan di Cina atau di Xinjiang. Pertama dikarenakan kebijakan Cina yang sangat keras terhadap siapapun yang menyuarakan kemerdekaan atau yang mencoba untuk mengintervensi kebijakan politik dari pemerintah Cina itu sendiri, sehingga pendirian itu hanya bisa dilakukan diluar wilayah Cina, kedua Jerman merupakan tempat dimana terdapat jumlah pelarian Uyghur terbesar di dunia.

World Uyghur Congress sendiri tidak menyuarakan pemisahan diri secara terang-terangan namun lebih kepada penuntutan atas ditegakkannya demokrasi dan hak untuk menentukan nasib etnis Uyghur sendiri (Reed dan Raschke : 2010). Namun, berbeda dengan organisasi-organisasi nasionalis lainnya yang hanya memiliki motivasi untuk memisahkan diri dengan negara induknya, WUC juga menaruh perhatian yang besar terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah Cina seperti pembatasan hak beragama, hak politik, hak menyuarakan pendapat, hak mendapatkan perlakuan yang setara di dalam negara, atau secara singkatnya WUC juga menaruh perhatian yang besar terhadap pelanggaran hak-hak sipil etnis Uyghur di Xinjiang.

Namun WUC menemui hadangan yang sangat berat untuk melakukan aktivitasnya ketika dukungan internasional yang mutlak dipelukan dalam memperjuangkan hak mereka mulai luntur seiring dengan keberhasilan Cina dalam memojokkan etnis Uyghur sebagai teroris. Nicolas Bequelin dari Human Right Watch, mengatakan bahwa pemerintah Cina telah sangat efektif melabeli gerakan nasionalis Uyghur dengan cap teroris, yang mana telah mengurangi simpati internasional bagi misi mereka. Mengakui keapatisan internasional pada isu Uyghur, banyak ahli mengatakan bahwa keadaan di Xinjiang sepertinya akan lebih buruk dari sebelumnya (Bhattacharji : 2009).

Penelitian ini ditujukan untuk melihat serta mengetahui bagaimana upaya diaspora Uyghur untuk memperjuangkan hak sipil rakyat Uyghur di Cina terutama dalam kaitannya dengan organisasi WUC yang dalam perjalananya

menghadapi hambatan-hambatan dalam mencapai tujuannya tersebut, antara lain adalah propaganda pemerintah Cina dan tidak adanya tekanan dunia internasional untuk mengubah keadaan di Xinjiang.

Kebijakan Pemerintah Cina Terhadap Etnis Uyghur di Xinjiang

Kebijakan pemerintah Cina terhadap etnis Uyghur sejak awal kekuasaannya pada tahun 1949 membuat kehidupan mereka dipenuhi dengan pelanggaran atas hak asasi yang mereka miliki, termasuk hak sipil. Meskipun pemerintah Cina mendeklarasikan Xinjiang sebagai daerah yang otonom, namun dalam prakteknya kehidupan rakyat di Xinjiang dikontrol dengan ketat.

Dari segi sosial, etnis Uyghur sebagai etnis mayoritas di Xinjiang sebelum 1949, perlahan tergusur dengan migrasi besar-besaran etnis Han yang dipromosikan oleh pemerintah Cina, dalam *People's Republic of China; White Paper on Xinjiang* tahun 2003, disinggung mengenai migrasi Han yang dikampanyekan pemerintah Cina pada saat itu ditulis: *"Since the founding of New China, considering Xinjiang's remoteness, backwardness and shortage of high-caliber personnel, the state has assigned, transferred or encouraged over 800,000 intellectuals and professional and technical personnel from inland regions to work in Xinjiang."* (Gunaratna et.al : 2010)

Jumlah etnis Han di Xinjiang pada tahun 1949, hanya berkisar antara 5-10%, namun meningkat menjadi 11% pada tahun 1955, 28% pada tahun 1968, dan 40% pada tahun 1971, hingga saat ini etnis Han berjumlah 40% menurut statistic dari RRC, namun persentase itu tidak memuat pasukan tentara, dan buruh yang tidak terdaftar sebagai penduduk Xinjiang, mereka semua adalah etnis Han. Sehingga para akademisi berasumsi jika saja para tentara dan buruh-buruh itu di muat kedalam catatan sipil, maka jumlah etnis Han akan melampaui jumlah dari Etnis Uyghur.

Ketika rezim Komunis berkuasa, etnis Uyghur yang menggunakan alphabet Arab dalam literatur mereka dipaksa untuk menggantinya dengan alphabet Cyrillic yang digunakan di Uni Soviet, hal ini kemudian berubah ketika hubungan antara Cina dan Soviet renggang pada tahun 1958, sehingga pemerintah Cina kemudian mengganti alphabet Cyrillic dengan alphabet Latin. Baru ketika Mao Ze Dong meninggal dunia pada tahun 1980, etnis Uyghur kembali diperbolehkan untuk menggunakan alphabet Arab. Para akademisi dari kalangan Uyghur mengatakan bahwa hal ini merupakan upaya sistematis dari pemerintah Cina untuk menghilangkan kebudayaan dan identitas Uyghur sebagai suatu bangsa, karena dengan demikian, anak-anak muda Uyghur tidak bisa mewarisi literatur kebudayaan mereka sendiri, karena literatur etnis Uyghur baik berupa buku, novel, drama, dongeng dan lain sebagainya, ditulis dalam alphabet Arab.

Etnis Uyghur juga mendapat perlakuan diskriminatif berkaitan dengan kebebasan beragama. Pada masa “Revolusi Budaya” yang dikampanyekan Mao Ze Dong, semua tempat ibadah di RRC diubah fungsinya menjadi tempat publik, di Xinjiang, pemerintah Cina mengubah halaman Masjid menjadi tempat penyembelihan babi. Kebijakan pemerintah Cina terkait dengan kebebasan beragama sedikit melonggar ketika Deng Xiao Ping berkuasa pada era 1970 sampai dengan 1980-an. Namun Beijing kembali menerapkan kebijakan keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai “*religious extremist*”. Kebijakan ini dikenal dengan “*strike hard policy*”. Pada tahun 1998, pemerintah pusat Cina menginstruksikan pemerintah Xinjiang untuk memperketat kebijakan terhadap hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Sampai saat ini, kebijakan diskriminatif pemerintah Cina terhadap kebebasan beragama di Xinjiang masih terus diterapkan. Terlebih pasca kerusuhan etnis yang terjadi di Urumqi pada tahun 2009, para pemimpin agama Islam di Xinjiang atau Imam, diharuskan untuk menjalani sertifikasi oleh pemerintah Cina, dan diwajibkan hadir di dalam pertemuan bulanan dengan utusan dari Biro Urusan Keagamaan dan Biro Keamanan Publik untuk diberi semacam “nasihat”. Sekolah-sekolah agama yang dianggap berbahaya ditutup. Para siswa sekolah dilarang untuk sholat berjamaah, dan dibentuk suatu sistem untuk memonitor isi ceramah khatib ketika sholat Jum’at diadakan (USCIRF : 2012).

Etnis Uyghur juga mengalami diskriminasi dalam bidang ekonomi. Pemerintah Cina mendirikan suatu instansi yang bernama *Xinjiang Production and Construction Corps* (XPCC), instansi ini diklaim oleh etnis Uyghur sebagai alat penjajahan dari etnis Han. Mayoritas anggota instansi ini berasal dari etnis Han. XPCC merupakan instansi yang unik, karena mereka independen, tidak berada dibawah negara, artinya pemerintah Xinjiang tidak bisa memerintah mereka. XPCC memiliki pasukan polisi sendiri, perusahaan agrikultural dan industri, jaringan buruh dan penjara sendiri. Dengan demikian, mereka bisa dengan mudah mengontrol sektor ekonomi di Xinjiang. Banyak petani Uyghur yang terpaksa menjual barangnya dengan harga yang dibawah standar, sedangkan petani Han bisa menjualnya dengan harga pasar, selain itu para pekerja mineral dan minyak bumi semua berasal dari etnis Han (Amnesty International : 1999). Diskriminasi di bidang ekonomi terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2010, diumumkan bursa pekerjaan untuk rumah sakit di Urumqi, dari 28 posisi yang ditawarkan, semua ditujukan kepada etnis Han.

Dengan kondisi seperti itu, maka perjuangan yang dilakukan oleh gerakan nasionalis Uyghur untuk memperjuangkan hak mereka hanya bisa dilakukan di luar Cina. Tidak ada ruang bagi mereka untuk menyuarakan pendapat mereka di bawah rezim Komunis. Untuk itu pemerintah Cina juga berusaha untuk membendung gerakan nasionalis tersebut dengan berbagai cara.

Ketika para pemimpin Uyghur berkumpul di Istanbul untuk membentuk suatu organisasi yang memayungi semua gerakan nasionalis Uyghur yang tersebar itu, pemerintah Cina mulai mendapatkan ancaman yang cukup serius, sehingga pemerintah Cina menuduh mereka memiliki rencana untuk memerdekakan Xinjiang pada tahun 2000. Walaupun organisasi yang dimaksud baru secara resmi terbentuk dengan nama East Turkestan National Centre pada tahun 1998, namun pemerintah Cina sudah menyadari ancaman serius yang bisa dihasilkan oleh organisasi tersebut. Untuk itu, pemerintah Cina mencegah agar simpati dan dukungan dari dunia internasional jangan sampai diberikan terhadap mereka dengan melabeli mereka dengan sebutan separatis yang bertujuan untuk memecah belah Cina.

Ketidakpedulian itu semakin memburuk setelah terjadi peristiwa 11 September 2001. Dimana pandangan tentang Muslim memburuk di mata masyarakat internasional. Cina langsung mengambil momentum ini untuk melebeli gerakan nasionalis Uyghur sebagai “teroris”. Pernyataan resmi pemerintah Cina terhadap “East Turkestan Terrorist” dikeluarkan pada Januari 2002, dimana pemerintah Cina membuat daftar berisi nama-nama kelompok yang diduga terkait dengan terorisme internasional, salah satunya ETIM (Davis : 2002).

Cina juga segera mengambil langkah untuk mendukung penuh kebijakan Amerika Serikat yang menyerukan perang terhadap terorisme. Semenjak itu kebijakan Cina terhadap gerakan nasionalis Uyghur semakin ketat. Amnesty Internasional mencatat bahwa setelah 11 September pemerintah Cina menjalankan kebijakan yang represif terhadap oposisi Uyghur dan melabeli mereka sebagai teroris untuk menutupi kekerasan yang mereka timbulkan (Amnesty International : 2004)

Pada berita yang dilansir oleh media *Xinhua* pada 15 Desember 2003, menteri keamanan publik Cina pada saat itu merilis daftar nama-nama organisasi serta individu-individu yang mereka sebut sebagai “East Turkestan Terrorist”, Berita itu selain berisi nama-nama kelompok dan anggota teroris, juga berisi tentang kegiatan-kegiatan terorisme yang dilakukan oleh mereka, daftar tersebut berisikan antara lain: Daftar organisasi teroris: (1) ETIM (2) ETLO (3) WUYC (4) ETIC. Daftar anggota teroris: (1) Hasan Mahsum (2) Muhanmetemin Hazret (3) Dolqun Isa (4) Abudujelli Kalakahs (5) Abdukadir Yapaquan (6) Abdumijit Muhammatkelim (7) Abudula Kariaji (8) Abulimit Turxun (9) Hudaberdi Haxerbik (10) Yasen Muhammad (11) Atahan Abuduhani (Reed dan Raschke : 2010).

Propaganda pemerintah Cina terhadap isu separatisme Uyghur nampaknya berhasil mencapai tujuannya. Dengan mengasosiasikan gerakan separatis dengan terorisme, sekali lagi pemerintah Cina berhasil mencegah isu ini untuk membesar dan menarik simpati dunia internasional.

Pada tahun 2004, gerakan nasionalis Uyghur yang tergabung didalam East Turkestan National Center ini terpecah menjadi dua kutub, garis keras yang tidak melihat cara lain selain dengan cara kekerasan dalam memperjuangkan tujuannya, dan kelompok moderat yang memperjuangkan tujuannya dengan cara-cara yang demokratis serta melalui advokasi. Kelompok moderat inilah yang kemudian bergabung dengan World Uyghur Youth Congress, pimpinan Dolqun Isa untuk membentuk World Uyghur Congress. WUC kemudian tumbuh menjadi organisasi nasionalis Uyghur yang terdepan dibandingkan dengan organisasi lainnya terutama mereka yang mengedepankan cara kekerasan dalam mencapai tujuannya. Bahkan WUC berani mengkalim diri sebagai satu-satunya organisasi sah yang mewakili rakyat Uyghur. Hal ini menjadikan WUC menjadi ancaman yang paling serius menyangkut isu Uyghur yang pernah dihadapi pemerintah Cina selama ini.

Untuk itu, sudah menjadi kepentingan pemerintah Cina untuk melancarkan propaganda terhadap WUC dengan mengelompokkan WUC dengan kelompok separatis dan teroris Uygur sebelumnya. Bagi pemerintah Cina, fakta bahwa WUC adalah organisasi bentukan para kelompok moderat didalam ETNC tidaklah penting. Yang penting adalah “menyatukan” gerakan-gerakan nasionalis Uyghur (termasuk WUC) itu dengan cap separatis dan teroris, tidak peduli bahwa ada organisasi nasionalis Uyghur yang memperjuangkan tujuannya dengan cara-cara yang demokratis seperti WUC, dengan cara ini, pemerintah Cina mengelompokkan WUC dengan East Turkestan Islamic Movement, yang memang seringkali terlibat dalam aksi-aksi kekerasan melawan pemerintah Cina, dan memiliki reputasi yang buruk di mata dunia internasional. Propaganda pemerintah Cina ini jugalah yang sedikit banyak mempengaruhi strategi WUC dalam perjuangannya. Seperti tidak menggunakan kata-kata yang secara eksplisit menyuarakan kemerdekaan East Turkestan, namun memilih menggunakan kata “memperjuangkan hak rakyat Uyghur dalam menentukan masa depan politiknya”. Hal ini demi menghindari propaganda pemerintah Cina yang menyerukan kepada dunia internasional agar tidak mendukung gerakan seapatis dan teroris yang bertujuan untuk memecah belah Cina.

Pada kerusuhan di Urumqi, ibukota Xinjiang tahun 2009 yang merupakan kerusuhan antar etnis terparah yang pernah terjadi disana, pemerintah Cina menuduh WUC sebagai otak kerusuhan tersebut, terutama Rebiya Kadeer sebagai Presidennya. Salah satu alat propaganda pemerintah Cina adalah sebuah website yang bernama *TrueXinjiang.com*, dimana didalam website tersebut, pemerintah Cina memaparkan peran dari Rebiya Kadeer serta WUC dalam tindakan-tindakan separatis dan kerusuhan yang terjadi di Urumqi (<http://truexinjiang.huanqiu.com/urumqi-riot/rebiya-kadeer/2011-08/1912156.html>). Namun tuduhan itu sampai saat ini tidak terbukti, tak ada

bukti keterlibatan WUC dalam kerusuhan tersebut. Hal ini juga telah dibantah oleh WUC sendiri.

Tidak hanya menuduh WUC terlibat dalam kerusuhan di dalam negerinya. Pemerintah Cina juga mengecam negara-negara yang mengakomodasi kegiatan WUC. Baru-baru ini, Pemerintah Cina menyatakan keberatannya atas kesediaan Jepang untuk menjadi tuan rumah Sidang Umum yang digelar WUC. Kejadian tersebut juga memicu hubungan yang kurang harmonis antara Cina dan Jepang, karena Cina menganggap Jepang mendukung gerakan separatisme Uyghur. Dari hal ini terlihat bahwa pemerintah Cina tidak segan-segan untuk mengecam negara-negara yang mendukung pergerakan WUC, tak terkecuali negara besar yang sangat berpengaruh secara regional maupun internasional bagi perekonomian Cina seperti Jepang.

Kebijakan pemerintah Cina yang keras dan kerap kali melancarkan propaganda terhadap siapapun yang menyuarakan separatisme ini tampaknya akan berlangsung terus di masa yang akan datang. Hal inilah yang merupakan salah satu hambatan bagi WUC untuk bisa mencapai tujuannya.

Diaspora dan Perjuangan Etnis Uyghur

Pada tahun 1955, pemerintah Cina mengganti nama Xinjiang menjadi Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). Mengisyaratkan bahwa Beijing menghargai pluralisme dan mendukung otonomi etnis Uyghur. Namun dalam perkembangannya, otonomi khusus tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi, sehingga disebut “*autonomy with Chinese characteristic*” yang bercirikan control ketat bagi etnis Uyghur dan terbatasnya kebebasan mereka secara politik, ekonomi, sosial dan religius.

Hal itu mengakibatkan migrasi besar-besaran etnis Uyghur keluar wilayah Xinjiang dan mengakibatkan apa yang dikenal dewasa ini dengan “*Uyghur Diaspora*”. Daerah migrasi yang dituju etnis Uyghur menyebar dari Asia Tengah, semenanjung Arab, Turki, Eropa dan Amerika Utara. Dan pada saat yang sama migrasi besar-besaran etnis Han ke daerah Xinjiang terus dilakukan, sehingga dalam beberapa dekade selanjutnya, posisi etnis Han yang sebelumnya minoritas, menjadi etnis yang mayoritas di Xinjiang.

Diaspora Uyghur tersebut kemudian melanjutkan perjuangan mereka dalam menuntut kemerdekaan diluar Xinjiang. Turki adalah negara yang paling mendukung gerakan diaspora Uyghur dikarenakan kedekatan etnis yang mereka miliki. Diaspora Uyghur di Turki tersebut menerbitkan buku, booklet, jurnal yang berkaitan dengan isu yang mereka angkat dan lain sebagainya. Namun dengan situasi perang dingin yang terjadi pada masa itu. Upaya mereka tidak membuahkan hasil yang berarti. Isu yang berkembang di dunia internasional pada masa perang dingin adalah isu keamanan, dan isu seperti

human rights dan *self-determination rights* tidak menjadi fokus aktor internasional. Hal ini ditambah dengan terbatasnya teknologi yang berkembang pada masa itu sehingga apa yang mereka perjuangkan tidak berdampak luas.

Keadaan kemudian berubah ketika Beijing, dibawah pimpinan Deng Xiao Ping melaksanakan kebijakan “*Open Door Policy*” pada akhir 1970-an, ditambah dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya penemuan internet pada tahun 1990-an, dan berakhirnya perang dingin, perjuangan dari gerakan nasionalis Uyghur mulai dikenal oleh dunia internasional. Pasca perang dingin, isu *human rights* dan *self-determination rights* kemudian muncul dan menggantikan isu keamanan konvensional sebelumnya.

Pada tahun-tahun tersebut, mulai dikenal organisasi-organisasi nasionalis Uyghur yang sangat beragam baik bentuk, tujuan, dan cara mencapai tujuan itu. Untuk itu, pada tahun 1992, para pemimin Uyghur pada saat itu berkumpul di Istanbul untuk membentuk suatu organisasi yang memayungi semua gerakan-gerakan nasionalis Uyghur yang tersebar itu, namun organisasi yang dimaksud baru terbentuk enam tahun kemudian, yakni pada tahun 1998 dengan nama East Turkestan National Centre (ETNC) . Pada tahun 2004 terdapat dua kutub di dalam East Turkestan National Centre ini yang terpecah menyangkut tentang cara mencapai tujuannya, pertama adalah kelompok garis keras yang mengedepankan cara kekerasan, kedua adalah kelompok moderat yang mengedepankan cara-cara yang demokratis. Kelompok moderat ini yang kemudian bergabung dengan World Uyghur Youth Congress dan membentuk WUC. Jadi disini bisa dilihat bahwa WUC ini seolah merupakan muara dari perjuangan gerakan-gerakan nasionalis Uyghur sebelumnya. WUC kemudian memperjuangkan hak rakyat Uyghur di Cina melalui advokasi dan propaganda.

WUC bertindak sebagai advokat dari etnis Uyghur yang ada di Cina. Etnis Uyghur disana tidak bisa berhubungan dengan dunia luar untuk mencari dukungan terhadap kondisi yang mereka alami. Masyarakat internasional merupakan sasaran perjuangan mereka. Hal ini bisa dipahami mengingat pemerintah Cina tidak pernah mau untuk mengakui WUC sebagai organisasi yang legal, WUC pun tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk berhadapan langsung dengan pemerintah Cina, walaupun terkadang WUC menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah Cina secara langsung kepada mereka, namun pemerintah Cina tidak sekalipun menggubrisnya. Untuk itu mereka mencari dukungan masyarakat internasional dengan lobi-lobi kepada para pembuat kebijakan harapan bahwa mereka bisa memberi tekanan terhadap pemerintah Cina agar mengubah kebijakannya yang melanggar hak-hak sipil rakyat Uyghur.

Sasaran lobi WUC ini bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori: 1. Pemerintah Negara-Negara di dunia, 2. Organisasi Internasional, dan 3. Media Internasional.

WUC mencoba untuk mencari dukungan dari pemerintah dan parlemen dari negara-negara yang mereka kunjungi, atau negara dimana terdapat organisasi perwakilan WUC didalamnya. Dalam kurun waktu antara 2006 sampai dengan 2009, WUC telah mengunjungi Kanada, AS, Jerman, Swiss, Norwegia, Italia, Swedia, Belgia, Belanda, Ukraina, Polandia, Ceko, Inggris, Turki, Austria, Prancis, Denmark, Estonia, Bosnia, Albania, Jepang, Filipina, Kazakhstan, dan Kyrgistan (<http://www.uyghurcongress.org/en/wp-content/uploads/WUC-Activities-Report-EN-Final.pdf>). Untuk organisasi internasional, WUC aktif dalam berbagai pertemuan di tingkat internasional dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PBB, Uni Eropa, serta organisasi-organisasi non pemerintah lainnya seperti UNPO (Unrepresented Nations and People Organization), HRIC (Human Rights In China), dan MRG (Minority Rights Group), Amnesty International, dan Human Rights Watch. Dengan cara ini, WUC bisa mengangkat isu Uyghur kedalam diskusi-diskusi yang mereka laksanakan, dan secara langsung maupun tidak, mendapatkan pengakuan dari dunia internasional akan keberadaan serta perjuangan mereka. Selain itu WUC juga aktif dalam mengcounter propaganda yang dilakukan oleh Cina dengan melakukan *counter propaganda* melalui media-media internasional. Meski demikian pada area ini WUC harus bekerja dengan lebih keras karena propaganda Cina yang melabeli gerakan nasionalis Uyghur sebagai “teroris” jauh lebih diterima oleh media internasional.

Etnonasionalisme Diaspora Uyghur

Landasan utama yang mendorong diaspora Uyghur tersebut untuk mendirikan WUC tidak lain merupakan etnonasionalisme etnis Uyghur. Sebelumnya, ada baiknya dilihat secara lengkap tujuan utama dari WUC yang dinyatakan secara resmi dalam situs mereka :

“The main objective of the WUC is to promote democracy, human rights and freedom for the Uyghur people and use peaceful, nonviolent, and democratic means to determine their political future. By representing as the sole legitimate organization of the Uyghur people both in East Turkestan and abroad, WUC endeavors to set out a course for the peaceful settlement of the East Turkestan Question through dialogue and negotiation.

The WUC declares a nonviolent and peaceful opposition movement against Chinese occupation of East Turkestan and an unconditional adherence to the international accepted human rights standard as laid down in the Universal Declaration of Human Rights, and adherence to the principals of democratic

pluralism and rejection of totalitarianism, religious intolerance, and terrorism as an instrument of policy." (<http://www.uyghurcongress.org/en/?p=430>)

Dari pernyataan WUC tersebut, bisa ditarik poin-poin utama perjuangan mereka yakni:

1. WUC memperjuangkan hak-hak rakyat Uyghur dalam menentukan masa depan mereka secara politis.
2. WUC mendeklarasikan diri sebagai *"the sole legitimate organization of the Uyghur people both in East Turkestan and abroad"*
3. WUC memperjuangkan tujuan mereka dengan cara dialog dan negosiasi.
4. Dan yang terpenting adalah tujuan akhir mereka, yakni pendirian negara merdeka yang bernama East Turkestan, memang hal ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam pernyataan diatas, namun bisa dilihat secara implisit melalui kata-kata *"The WUC declares a nonviolent and peaceful opposition movement against Chinese occupation of East Turkestan..."*.

World Uyghur Congress menggunakan kata *"occupation"* dalam *"Chinese occupation of East Turkestan"*, yang mengisyaratkan bahwa Cina telah secara ilegal memaksakan kedaulatannya atas East Turkestan. Dan terakhir, WUC menolak menggunakan kata *"Xinjiang"* namun lebih memilih untuk menyebut daerah tersebut dengan sebutan *"East Turkestan"*, ini bisa dipahami mengingat *"Xinjiang"* merupakan nama yang diberikan oleh pemerintah Cina bagi daerah paling barat di Cina tersebut, sedangkan bagi rakyat Uyghur sendiri, mereka mengenalnya dengan *"East Turkestan"* selaras dengan negara yang pernah didirikan oleh mereka dengan nama yang sama.

Dilihat dari poin-poin diatas bahwa terdapat penekanan pada identitas etnis Uyghur dalam perjuangan WUC. WUC mengatasnamakan diri sebagai perwakilan rakyat Uyghur, memperjuangkan hak-hak rakyat Uyghur, dan secara implisit bertujuan untuk mendirikan negara merdeka bagi rakyat Uyghur. Sekarang jelaslah bahwa faktor yang mendorong WUC dalam perjuangannya adalah faktor etnis atau etnonasionalisme.

Etnonasionalisme sendiri adalah bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas ketimbang territorial. Atau secara sederhana bisa diartikan sebagai nasionalisme yang terbatas pada ikatan kesukuan. Sebagai perbandingan, negara Indonesia juga didirikan atas dasar nasionalisme, namun nasionalisme itu tidak terbatas pada suku-suku tertentu saja, melainkan dilandaskan pada batas territorial yakni perjuangan rakyat yang terbentang dari ujung pulau Sumatera sampai pulau Papua. Dalam konteks ini, nasionalisme yang ada tidak dilandasi dengan asal ras, asal etnis atau asal nenek moyang, atau dengan sifat-sifat budaya yang nyata seperti bahasa atau agama (lihat Zon : 2002, Leslie : 1988, Sahetapy : 2008, Gellner : 1964). Berbeda

misalnya dengan Israel yang didirikan dengan motivasi kesukuan dan keagamaan yang terbatas, yakni negara yang berdiri atas landasan suku dan agama Yahudi saja. Disanalah terletak inti dari etnonasionalisme, yakni adanya penonjolan diri dari suatu kelompok etnis yang membedakan mereka dengan kelompok yang lain.

Bila dipahami secara seksama, etnonasionalisme Uyghur yang melandasi perjuangan WUC adalah sesuatu yang wajar bila timbul diantara rakyat Uyghur. Hal ini karena pada dasarnya secara alamiah, manusia terbagi-bagi menjadi suku-suku yang berbeda, dan identitas kesukuan itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir serta menjadi pusat keberadaannya, kemudian manusia lebih suka jika hidup berdampingan dengan mereka yang memiliki kesamaan kebangsaan, dan yang terpenting adalah mereka tidak senang jika diperintah oleh mereka yang berbeda kebangsaan. Ini adalah faktor internal munculnya etnonasionalisme.

Sedangkan dilihat dari faktor eksternalnya, etnonasionalisme dipicu oleh kegagalan negara yang umumnya berbentuk negara bangsa, dalam merespon keinginan-keinginan rakyatnya, gagal dalam memberikan kesejahteraan, serta gagal dalam memenuhi kontrak sosial dengan rakyatnya. Sehingga rakyat pun merespon hal ini dengan berbagai macam reaksi seperti konflik, demonstrasi, dan yang paling ekstrem adalah tuntutan kemerdekaan. Pada tingkatan ini, ikatan kesukuan memiliki arti penting dan memainkan peran yang sangat vital. Akumulasi dari kekecewaan rakyat terhadap negara, bisa terwujud dalam semangat etnisitas yang berlebih dalam membela kepentingannya. Terlebih lagi jika etnis tersebut memiliki sejarah independensi yang kemudian direbut oleh bangsa lain. Kemudian ada fakta penting lainnya, yakni dari sekian banyak bangsa yang mendiami wilayah Asia Tengah, hanya bangsa Uyghur saja yang tidak memiliki suatu negara merdeka. Bangsa Uzbek, Kirgiz, Mongol, Kazak, dan Tajik misalnya, mereka masing-masing memiliki negara merdeka yakni Uzbekistan, Kirgistan, Mongolia, Kazakstan, dan Tajikistan.

Hal inilah yang kemudian menjadi landasan perjuangan WUC dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Uyghur. Etnonasionalisme Uyghur yang terakumulasi dalam tuntutan pemisahan diri dari Cina yang merupakan konsekuensi dari keadaan identitas bangsa Uyghur yang terjajah serta akar sejarah panjang kemerdekaan East Turkestan yang berakhir ketika Cina menganeksasinya pada 1949.

Penutup

Upaya diaspora Uyghur dalam memperjuangkan hak rakyat Uyghur bisa tergambar dari apa yang dilakukan oleh WUC. WUC berperan sebagai advokat bagi rakyat Uyghur untuk mengakses dan melobi pembuat kebijakan, dalam hal ini pembuat kebijakan di negara-negara yang mereka kunjungi, organisasi

internasional, dan media internasional, untuk melakukan sesuatu dengan keadaan yang mereka alami saat ini.

Sedangkan propaganda yang dilakukan WUC berupa *counter-act* dari propaganda pemerintah Cina sebelumnya. Namun belum ada tindakan nyata dari dunia internasional untuk mengambil kebijakan terhadap pelanggaran hak sipil rakyat Uyghur di Xinjiang, hal ini diakui sendiri oleh presiden WUC Rebiya Kadeer, yang mengatakan bahwa posisi Cina yang sangat kuat di bidang ekonomi, telah membuat negara-negara lain enggan untuk merusak hubungan perekonomian mereka dengan Cina melalui isu Uyghur ini.

Walaupun sekilas tampak bahwa perjuangan WUC ini tidak membuahkan hasil apapun dikarenakan *statu quo* masih dipertahankan di Xinjiang, namun jika dianalisis lebih lanjut, maka akan terlihat bahwa WUC telah membuka jalan bagi tercapainya tujuan yang mereka inginkan. Mereka berhasil dalam langkah yang paling awal dalam perjuangan mereka, yakni mengenalkan isu Uyghur kepada dunia internasional. Mereka telah mengangkat isu Uyghur ke dunia internasional, meningkatkan *awareness* diantara para politisi dan masyarakat di negara-negara tersebut mengenai isu Uyghur. *Public awareness* yang dihasilkan oleh lobi-lobi dan propaganda WUC ini akan sangat berguna bagi perjuangan mereka di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Alonso, Andoni dan Pedro J. Oiarzabal (penyunting), 2010, *Diasporas in the New Media Age Identity, Politics, and Community*, Reno : University of Nevada Press.
- Amnesty International, 1999, *Amnesty International; People's Republic of China; Gross Violations of Human Rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region*; 21 April 1999, dalam situs <http://www.uyghurcongress.org/en/wp-content/uploads/31-March-1999-Amnesty-International.pdf>, diunduh pada 27 Agustus 2012.
- Amnesty International, 2009, *China: "Justice, Justice"; The July 2009 Protest In Xinjiang, China*, dalam situs <http://www.uyghurcongress.org/en/wp-content/uploads/AI-Report-2-July-2010.pdf>, diunduh pada 27 Agustus 2012.
- Bhattacharji, Preeti. 2009, *Uighurs and China's Xinjiang Region* dalam situs http://www.cfr.org/publication/16870/uighurs_and_chinas_xinjiang_region.html diunduh pada 1 November 2010.
- Chung, Chen –peng. 2002, *China's' War on Terror': September 11 and Uighur Separatism*, yang diunduh dalam situs http://www.cfr.org/publication/4765/chinas_war_on_terror.html diunduh pada 15 Desember 2011.
- Davis, Elisabeth Van Wie. 2002, *Uighur Muslim Ethnic Separatism in Xinjiang, China* dalam situs <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA493744> diunduh pada 1 November 2010.
- Gunaratna , Rohan, Arabinda, dan Wang Pengxin, 2010, *Ethnic Identity and National Conflict in China*, New York : Palgrave Macmillan.
- Holsti , K. J., *International Politics*, 1983, volume 1, edisi keempat, (diterjemahkan oleh M. Tahir Azhary), Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Leslie, Peter M. 1988. *Ethnonationalism in a Federal State : the Case of Canada*. Ontario : Queen's University Kingston.
- Rahman , Anwar. 2005. *Sinicization Beyond The Great Wall:China's Xinjiang Uighur Autonomous Region*. Leicester : Troubador Publishing Ltd.
- Reed , J.Todd dan Diana Raschke, 2010, *The ETIM China's Islamic Militants and the Global Terrorist Threat*, California : Praeger
- Sahetapy , Pertoneela, 2008. *Etno-Nasionalisme (Suatu Aksi Atau Reaksi Dari Pentas Politik Indonesia)*, *Populis*, vol 3, no. 1, dalam situs isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3108915.pdf diakses pada 12 Februari 2012.
- USCIRF, 2012, *Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom March 2012*, dalam situs <http://www.uscirtf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012%282%29.pdf>, diunduh pada 27 Agustus 2012.
- World Uyghur Congress, 2009, *World Uyghur Congress Activities Report (October 2006-March 2009)*, dalam situs

<http://www.uyghurcongress.org/en/wp-content/uploads/WUC-Activities-Report-EN-Final.pdf> diunduh pada 20 November 2012.

Zhao, Zhongwei dan Fei Guo (penyunting), 2007, *Transition and Challenge China's Population at the Beginning of the 21st Century*, New York : Oxford University Press.

Zon, Fadli, 2002, *Gerakan Etnonasionalis Bubarnya Imperium Uni Soviet*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Internet :

Ethnic Groups in Xinjiang dalam situs <http://www.fom.sg/Ethnic%20Groups%20in%20Xinjiang.pdf> diunduh pada 16 Desember 2011.

History, dalam situs <http://truexinjiang.huanqiu.com/basic-facts/2011-08/1912844.html>, diakses pada 15 Januari 2013.

Introducing the World Uyghur Congress dalam situs <http://www.uyghurcongress.org/en/?cat=149>, diunduh pada 1 November 2011.

Mission Statement » World Uyghur Congress dalam <http://www.uyghurcongress.org/en/?p=430>, diunduh pada 7 Agustus 2012.

Unveiled rebiyaa kadeer: a Uighur Dalai Lama dalam <http://truexinjiang.huanqiu.com/urumqi-riot/rebiya-kadeer/2011-08/1912156.html>, diunduh pada 23 Juli 2012.

Uyghur Separatist Step Up Protest During Olympic Run-Up dalam <http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav040308b.shtml>, diunduh pada 23 Juli 2012.

Xinjiang Uygur Autonomous Region dalam situs <http://www.accci.com.au/keycity/xinjiang.htm>, diakses pada 16 Desember 2011.